

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu organisasi melalui program pendidikan dan pelatihan (Diklat) sangat penting, menjadi fokus utama, dan harus diselenggarakan secara berkelanjutan. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Seni Budaya Yogyakarta adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon II berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia. Tugas utama BBPPMPV adalah mengembangkan, memberdayakan, dan menciptakan guru dan tenaga kependidikan profesional.

Penyelenggara diklat guru dan tenaga kependidikan seni budaya di Indonesia sangat langka, bahkan di tingkat nasional yang berada di bawah Kemdikbudristek hanya satu, yaitu; BBPPMPV Seni Budaya Yogyakarta. Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA 2020) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dalam web-nya menjelaskan bahwa penyelenggara diklat di seluruh Indonesia sebanyak 140 lembaga. Jumlah penyelenggara diklat tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah guru yang melebihi 3,5 juta. Kelangkaan penyelenggara diklat seni budaya menyebabkan pembiayaan diklat menjadi mahal dan antrian berlangsung lama. Diklat mahal karena seorang guru seni Papua, Aceh, dan Nusa Tenggara Timur harus melakukan perjalanan jauh ke Yogyakarta untuk

mengikuti diklat seni budaya, sedangkan antrian diklat berlangsung lama karena lembaga diklat seni budaya hanya satu untuk melayani guru seni seluruh Indonesia, sehingga kesempatan menjadi sempit.

Pelaksanaan diklat guru seni budaya terkendala letak geografis Indonesia yang ber pulau-pulau. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Seni Budaya menyebar di seluruh Indonesia, sedangkan lembaga diklat seni budaya hanya satu, sehingga distribusi peserta diklat kadang tidak merata. Diklat dilaksanakan di BBPPMPV Seni Budaya Yogyakarta, sehingga guru seni budaya sebagai peserta diklat yang berada di daerah atau pelosok kesulitan mengikuti diklat. Disamping terkendala dalam pelaksanaan, kondisi geografis mempengaruhi pemberitahuan dan penyampaian undangan pemanggilan calon peserta diklat, tidak jarang surat undangan sampai ke calon peserta diklat sudah melewati tanggal pelaksanaan. Pendataan guru juga menjadi kendala, karena belum semua guru seni budaya terakomodir, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan calon peserta diklat (BBPPMPV, 2020).

Kualitas penyelenggaraan lembaga diklat guru belum berkualitas dan terstandar. Data SIPKA (2020) menginformasikan bahwa dari 38,288 program diklat di seluruh Indonesia hanya 456 program diklat terakreditasi. Data tersebut menunjukkan bahwa hanya 1,19% penyelenggara diklat memenuhi standar manajemen diklat, padahal manajemen diklat terstandar dan berkualitas berpengaruh terhadap kualitas peserta diklat. Chaerudin (2019) mengatakan bahwa manajemen diklat diperlukan agar kegiatan pelatihan (*training*) mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan. Upaya menyelesaikan

persoalan pengelolaan pendidikan adalah melaksanakan prinsip manajemen terhadap seluruh komponen pendidikan (Kusumawati, 2018). Dengan pelaksanaan manajemen yang baik, semua perangkat pendidikan dapat bersinergi, sehingga kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan (Kurniadin & Machali, 2014).

Peralatan dan fasilitas praktik sudah ketinggalan dari industri dan dunia kerja (Iduka). Sebagian besar peralatan dan fasilitas praktik BBPPMPV Seni Budaya diadakan di bawah tahun 2000, sehingga sudah *kedaluwarsa* dan tidak cocok dengan perkembangan teknologi. Disamping itu, untuk memperbaharui dan memperbaiki peralatan praktik tidak mudah, karena *spare part* mesin sudah tidak diproduksi dan anggaran pemerintah tidak terfokus pada peralatan. Ketinggalan peralatan dan fasilitas tersebut terutama bidang teknologi rekayasa, contoh; hasil observasi peneliti menemukan; dua unit mesin *Computer Numerical Control* (CNC) di kriya kayu sudah rusak dan tidak dapat di program ulang, *software* mesin bordirkomputer di kriya tekstil sudah rusak, beberapa tungku pemanas elektrik di kriya keramik sudah tidak operasional, dan mesin *copy* master model di kriya logam sudah rusak. Mesin setrika kulit, mesin pounds/mesin potong kulit, dan mesin seset sudah tertinggal dari mesin yang ada di industri. Untuk mesin setrika kulit hanya untuk ukuran terbatas (ukuran maksimal 20 cm x 20 cm), sedangkan untuk mesin seset hanya terbatas untuk menyetet atau menipiskan bagian kecil (bagian tepi kulit) atau hanya untuk ukuran kecil tidak bisa untuk selebaran kulit.

Guru dan tenaga pendidikan seni budaya masih sedikit dan belum berkualitas. Susatya (2013) menyatakan bahwa permasalahan pokok di bidang pendidik adalah rendahnya kualitas guru dan relevansi kompetensi guru. Data BBPPMPV Seni Budaya menyebutkan jumlah guru seni budaya di seluruh Indonesia relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah sekolah di seluruh Indonesia (Renstra 2015-2019). Kurangnya guru dengan *background* seni budaya menjadikan proses belajar mengajar kurang efektif (Fitriah and Vivian 2022). Contoh permasalahan, sekolah tidak mempunyai guru seni budaya, sehingga sekolah harus memanfaatkan guru berkompetensi lain untuk mengajar seni budaya hanya karena bisa menari, bisa mendalang, bisa menyanyi, senang menabuh gamelan, atau senang melihat teater.

Kompetensi guru seni budaya lebih rendah dibanding guru non seni budaya. Data hasil uji kompetensi guru (UKG) menunjukkan bahwa dari 206.416 guru seni budaya baru 7.311 guru mengikuti UKG dan masih 199.105 guru belum mengikuti UKG. Data BBPPMPV Seni Budaya tentang hasil UKG guru seni budaya terlihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Hasil UKG guru seni budaya

Jenjang	≥ 76	60 – 75,99	40 – 59,99	≤ 40	TOTAL
SD	0	4	149	561	714
SMP	2	91	1.984	2.333	4.410
SMA	3	27	717	529	1.276
SMK	11	98	517	285	911
Jumlah	16	220	3.367	3.708	7.311

Sumber: BBPPMPV Seni Budaya, 2022.

Kuantitas tenaga fungsional (widyaiswara dan instruktur) BBPPMPV Seni Budaya masih kurang. Dari sekitar 220 karyawan, tenaga fungsional berstatus widyaiswara berjumlah 52 orang dan berstatus instruktur 0 orang, dengan jumlah tersebut harus melaksanakan kegiatan diklat sangat banyak (Lakin 2021-2022). Data karyawan BBPPMPV Seni Budaya terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2.

Karyawan/pegawai BBPPMPV Seni Budaya Yogyakarta

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Struktural	2
2	Widyaiswara	52
3	Instruktur	0
4	PTP (Pengembang Teknologi Pendidikan)	22
5	PPBJ	1
6	Analisis Kepegawaian	1
7	Pelaksana	142
	Jumlah	220

Sumber: Lakin 2021-2022

Anggaran penyelenggaraan diklat dari pemerintah belum memenuhi standar penyelenggaraan diklat guru produktif. Anggaran sangat mempengaruhi kualitas penyelenggaraan dan target peserta diklat. Data BBPPMPV Seni Budaya menjelaskan belum seluruh guru SMK Seni Budaya mendapatkan kesempatan mengikuti diklat, karena anggaran terbatas. BBPPMPV Seni dan Budaya baru menyelenggarakan diklat di kota-kota besar dan kota yang mudah dijangkau, serta belum menyentuh kota kecamatan.

Anggaran penyelenggaraan diklat kompetensi guru produktif di BBPPMPV Seni Budaya tersaji pada tabel 1.3.

Tabel 1.3.

Anggaran diklat kompetensi guru produktif

No	Tahun	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2021	11.959.656.000
2	2022	14.595.769.000
3	2023	24.325.818.000

Sumber: DIPA tahun 2021-2022-2023

Ketersediaan anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan diklat dari tahun 2021 s.d. 2023 selalu meningkat, hal ini dikarenakan program pemerintah untuk merevitalisasi SMK sangat serius. Tahun 2021 anggaran sebesar Rp. 11.959.656.000 dengan keterserapan anggaran sebesar Rp. 10.952.652.965,- sama dengan 91,58%, (DIPA-2021). Kegiatan diklat tahun 2022 ketersediaan anggaran sebesar Rp. 14.595.769.000,- keterserapan anggaran diklat guru produktif sebesar 13.571.589.272,- atau sama dengan 92,98% (DIPA-2022). Sedangkan diklat produktif tahun 2023 dialokasikan anggaran pemerintah sebesar Rp. 24.325.818.000,- daya serap pelaksanaan diklat Rp. 21.874.506.226,- sama dengan 89,92 % (DIPA-2023).

Manajemen penyelenggaraan diklat guru produktif seni budaya belum pernah diteliti dan dianalisis secara akademis. Keberhasilan pengelolaan diklat tergantung pada kualitas; program, narasumber, fasilitas, dan pelayanan. Susatya (2010) menjelaskan bahwa aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelatihan adalah kualitas; (a) narasumber, (b) program, (c) fasilitas akademik, (d) fasilitas penunjang, dan (e) pelayanan. Secara operasional,

pelaksanaan diklat guru produktif seni budaya di BBPPMPV Seni Budaya terlaksana dengan baik. Evaluasi pelaksanaan diklat dilakukan secara internal dalam bentuk laporan, namun belum dianalisis secara ilmiah. Padahal, kajian ilmiah pelaksanaan diklat sangat membantu peningkatan kualitas hasil diklat. Pendidikan dan pelatihan menitikberatkan pada peningkatan dan penyempurnaan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku seorang pegawai dalam hal ini guru sebagai pendidik di sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional. Data BBPPMPV Seni Budaya menunjukkan pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi guru sesuai program, target peserta diklat tercapai, dan penyusunan pelaporan sesuai target waktu. Berikut data pelaksanaan diklat guru produktif seperti ditampilkan pada tabel 1.4.

Tabel 1.4.

Data pelaksanaan diklat guru produktif

Tahun	Program	Peserta Diklat	Status Pelaporan Diklat
2021	Diklat produktif	324 guru	Selesai tanggal 21 Nopember 2021
2022	Diklat produktif	463 guru	Selesai tanggal 30 Nopember 2022
2023	Diklat produktif	378 guru	Selesai tanggal 21 Nopember 2023

Sumber: Data Diklat BBPPMPV Seni Budaya 2021-2023.

Pelaksanaan diklat guru produktif tahun 2021 mempunyai sasaran peserta diklat (petatar) sebanyak 324 guru, realisasi guru yang mengikuti diklat sebanyak 282 guru, dengan demikian target peserta diklat sebesar 87,04 %. Tahun 2022 sasaran peserta diklat (petatar) sebanyak 463 guru, meningkat dari tahun 2021 sebesar 181 peserta diklat atau naik 64,18%. Realisasi guru yang menghadiri diklat sebanyak 439 guru, sehingga target kehadiran peserta diklat (petatar) sebesar 94,82 %. Sedangkan diklat tahun 2023 sasaran peserta diklat

(petatar) sebanyak 378 guru, turun 85 (18,36%) guru jika dibandingkan tahun 2022 dan realisasi tercapai 100 % karena semua guru yang diundang hadir mengikuti diklat. Pelaksanaan diklat produktif tahun 2021 s.d. 2023 terjadi fluktuatif atau naik turun karena beberapa faktor, antara lain; dampak Covid-19, sistem pemanggilan kadang terlambat sampai ke calon peserta diklat, dan kesibukan guru.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti memfokuskan pada penyelenggaraan diklat di BBPPMPV Seni Budaya, khususnya pelaksanaan diklat guru produktif seni kriya, dengan alasan; belum pernah diadakan penelitian, mempunyai tantangan tersendiri, dan mempunyai keunikan tentang guru seni budaya yang terasa dilupakan. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi pemangku kepentingan pendidikan dalam membuat kebijakan diklat peningkatan guru seni budaya dan menjadi tolak ukur perbaikan manajemen diklat seni budaya.

B. Identifikasi Masalah

1. Penyelenggara diklat guru dan tenaga kependidikan seni budaya di Indonesia sangat langka,
2. Pelaksanaan diklat guru seni budaya terkendala letak geografis Indonesia yang ber pulau-pulau,
3. Kualitas tata kelola lembaga diklat guru belum berkualitas dan terstandar,
4. Peralatan dan fasilitas praktik sudah ketinggalan dengan industri dan dunia kerja (Iduka),
5. Guru dan tenaga kependidikan seni budaya masih sedikit dan belum berkualitas,

6. Kompetensi guru seni budaya lebih rendah dibanding guru non seni budaya,
7. Jumlah tenaga fungsional (widyaiswara dan instruktur) BBPPMPV Seni Budaya masih kurang,
8. Anggaran penyelenggaraan diklat dari pemerintah belum memenuhi standar penyelenggaraan diklat,
9. Manajemen penyelenggaraan diklat guru produktif seni budaya belum pernah diteliti dan dianalisis secara akademis.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, penelitian dibatasi pada manajemen diklat guru produktif seni budaya dan difokuskan pada penyelenggaraan diklat guru produktif seni kriya di BBPPMPV Seni Budaya, terutama pada aspek; kualitas program, kualitas tenaga fungsional (penatar), dan kualitas pelayanan diklat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualitas program diklat guru produktif seni kriya di BBPPMPV Seni Budaya?
2. Bagaimana kualitas tenaga fungsional pada diklat guru produktif seni kriya di BBPPMPV Seni Budaya?
3. Bagaimana kualitas pelayanan diklat guru produktif seni kriya di BBPPMPV Seni Budaya?

E. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kualitas program diklat guru produktif seni kriya di BBPPMPV Seni Budaya,

2. Menganalisis kualitas tenaga fungsional pada diklat guru produktif seni kriya di BBPPMPV Seni Budaya,
3. Menganalisis kualitas pelayanan diklat guru produktif seni kriya di BBPPMPV Seni Budaya.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap proses penyelenggaraan diklat.
 - b. Memberikan referensi bagi lembaga diklat tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat.
 - c. Sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan diklat.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penyelenggara diklat
 - 1) Menginspirasi untuk melakukan perubahan prosedur penyelenggaraan diklat.
 - 2) Menyadarkan bahwa manajemen diklat perlu diterapkan secara baik dan konsisten.
 - 3) Memberi gambaran tentang proses penyelenggaraan diklat.
 - b. Bagi kepala lembaga diklat
 - 1) Menginspirasi kepala lembaga diklat untuk melakukan perubahan proses penyelenggaraan diklat,
 - 2) Memberi masukan kepala lembaga diklat dalam menerapkan manajemen diklat.

3. Bagi pemerintah

- a. Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan diklat nasional sesuai kebutuhan pelanggan,
- b. Memberi gambaran kendala dan permasalahan penyelenggaraan diklat.